

## Kajian Lingkungan Kawasan Pemukiman Padat Penduduk Di Kelurahan Hamadi Dan Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan

*Mercyana Trianne Zebua*

*Dosen Program Studi Arsitektur Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura*

*Email; mercyanatrianne.zebua@gmail.com*

### **Abstract**

*The increasing population in an area that is not supported by the availability of sufficient land . The aims these research to answer these problems, it is necessary to knowing determine the condition of densely populated settlements and knowing infrastructure in densely populated areas than making the arrangement of a densely populated area of environmentally sound. So the research has been conducted in a densely populated residential area in South Jayapura District, in Hamadi Village and Entrop Village. The methods used are interviews and questionnaires were analyzed using Powersim and Analytical Hierarchy Process ( AHP ) . Conclusion these research is to showed that the conditions of densely populated settlements in Hamadi Village and Entrop Village included in densely populated settlements were the conditions of the settlement are not in accordance with the standards of sustainable settlements . Facilities and infrastructure necessary to reorder and repair so as not to further damage the environment . Government policies need to be made to the arrangement of densely populated areas , ranging from data collection number of houses , the feasibility of the undeveloped land , saknsi firm for the building area that is not worth waking and community participation through traditional and religious leaders need to be improved .*

*Keywords; Settlements, settlements area , settlement environmental*

### **Abstrak**

Peningkatan jumlah penduduk pada suatu daerah akan meningkatkan pula kebutuhan akan permukiman. Tetapi peningkatan akan permukiman tidak didukung dengan ketersediaan lahan yang cukup. Tujuan penulisan ini adalah, guna mengetahui kondisi permukiman padat penduduk dan mengetahui sarana prasarana pada kawasan padat penduduk, serta membuat penataan kawasan padat penduduk berwawasan lingkungan. Maka telah dilakukan penelitian pada Kawasan permukiman padat penduduk di Kota Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop. Metode yang digunakan adalah wawancara dan kuisioner yang dianalisis menggunakan Powersim dan Analysis Hierachy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi permukiman padat penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop termasuk dalam permukiman padat penduduk sedang dengan kondisi permukiman yang tidak sesuai dengan standar permukiman yang berkelanjutan. Sarana dan prasarana perlu penataan dan perbaikan sehingga tidak semakin merusak lingkungan. Kebijakan pemerintah perlu dibuat untuk penataan kawasan padat penduduk, mulai dari pendataan jumlah rumah, kelayakan terhadap lahan terbangun, saknsi tegas bagi yang membangun didaerah yang tidak layak bangun dan partisipasi masyarakat melalui tokoh adat dan agama perlu di tingkatkan.

Kata Kunci; Permukiman, penataan permukiman, permukiman berwawasan lingkungan, AHP

### **1. Pendahuluan**

Kota Jayapura berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik Papua tahun 2013), jumlah penduduk dalam lima tahun semakin meningkat tersebar di 5 distrik yaitu; Distrik Jayapura Utara, Distrik

Jayapura Selatan, Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Muara Tami.

Kota Jayapura merupakan pusat permukiman terpadat di Provinsi Papua dengan luas wilayah 940 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 271,012 jiwa pada

tahun 2013 ( Sumber: BPS tahun 2013) dengan tingkat pertumbuhan mencapai 4,10 % per tahun.

Distrik Jayapura Selatan memiliki luas wilayah 4.340 Hektar atau 43,4 Km<sup>2</sup>. Distrik Jayapura Selatan terdiri atas 5 Kelurahan dan 2 Kampung, yaitu; Tahima Soroma 1.8 Km<sup>2</sup> atau 180 Ha dan Tobati 0.5 Km<sup>2</sup> atau 50 Ha. Luas Wilayah Numbay masing-masing 2.7 Km<sup>2</sup> atau 270 Ha, Hamadi 2.7 Km<sup>2</sup> atau 270 Ha, Argapura 9.3 Km<sup>2</sup> atau 930 Ha, Entrop 10 Km<sup>2</sup> atau 1,000 Ha dan Kelurahan Ardipura 16.4 Km<sup>2</sup> atau 1,640 Ha (Sumber; RTRW Kota Jayapura, Tahun 2007-2027). Laju pertumbuhan penduduk di Distrik Jayapura Selatan adalah 3,7% pertahun, dimana kepadatan penduduk tinggi terletak pada Kelurahan Entrop dan Hamadi, yang juga merupakan kawasan cagar budaya.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan pemukiman.

Pembangunan kawasan permukiman khususnya pemukiman padat penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop berdasarkan pengamatan hanya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal (rumah) tanpa mempertimbangkan terciptanya kawasan permukiman yang manusiawi atau berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan masalah lingkungan seperti : rumah-rumah tidak terstruktur dengan baik (kepadatan bangunan tinggi, tipe rumah beraneka ragam), jalan yang sempit, kurangnya ruang terbuka hijau, sistem drainase yang tidak memadai ditandai dengan penumpukan sampah pada saluran pembuangan, jaringan air bersih yang tidak terstruktur dengan baik, jaringan listrik dan telepon yang masih terbatas, tempat pembuangan sampah dan pengelolannya tidak di sesuaikan dengan jumlah sampah tiap harinya dan perluasan

kawasan pemukiman tanpa mempertimbangkan lingkungan sekitar khususnya kawasan lindung sekitar Cagar Alam Teluk Youtefa (luasnya 1650 ha).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu kajian lingkungan pada kawasan permukiman khususnya permukiman padat penduduk di Kelurahan Hamadi dan Entrop sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan lebih lanjut.

## 2. Metode Penelitian

### 2.1. Studi Pustaka

#### 2.1.1. Konsep Penataan Kawasan Permukiman

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mendefinisikan penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sedangkan pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. (Deddy .2010). Prinsip dasar pembangunan berkelanjutan terdiri atas aspek-aspek (Budiharjo, Sutarto; 1999) : ekonomi (kesejahteraan), ekologi (lingkungan), *equity* (pemerataan), *engagement* (peranserta), dan energy.

#### 2.1.1.1. Konsep Permukiman

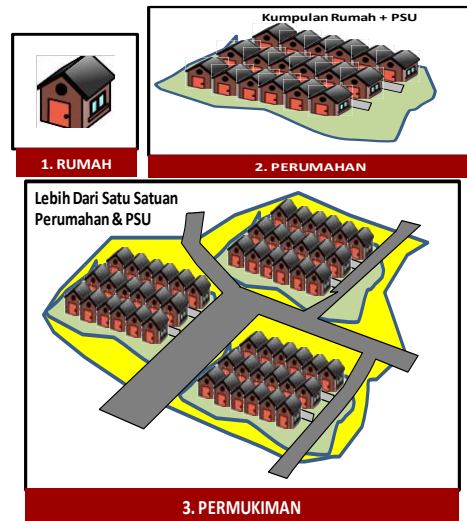
Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undang No.4 tahun 1992 adalah sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Menurut Koestoer (1995) batasan permukiman adalah terkait erat

dengan konsep lingkungan hidup dan penataan ruang. Permukiman adalah area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Parwata (2004) menyatakan bahwa permukiman adalah suatu tempat bermukim manusia yang telah disiapkan secara matang dan menunjukkan suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya. Permukiman merupakan suatu proses seseorang mencapai dan menetap pada suatu daerah (Van der Zee, 1986).

Kegunaan dari sebuah permukiman adalah tidak hanya untuk menyediakan tempat tinggal dan melindungi tempat bekerja tetapi juga menyediakan fasilitas untuk pelayanan, komunikasi, pendidikan dan rekreasi. Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari: (1) isi, yaitu manusia sendiri maupun masyarakat; dan (2) wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari alam dan elemen-elemen buatan manusia. Dua elemen permukiman tersebut, selanjutnya dapat dibagi ke dalam lima elemen yaitu: (1) alam yang meliputi: topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan iklim; (2) manusia yang meliputi: kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dsb), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral; (3) masyarakat yang meliputi: kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan administrasi; (4) fisik bangunan yang meliputi: rumah, pelayanan masyarakat (sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi; dan (5) jaringan (*net work*) yang meliputi:

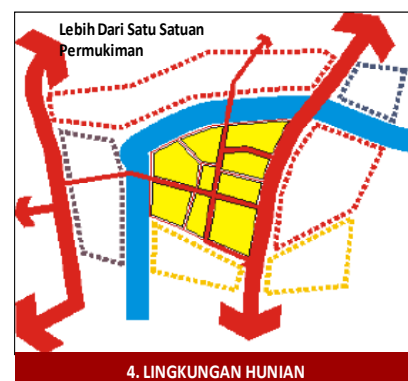
sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, drainase dan air kotor, dan tata letak fisik.

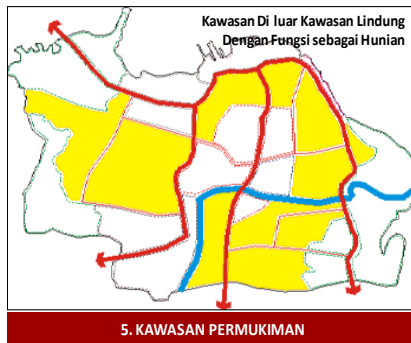


Gambar 2.1. Konsep Perumahan dan Permukiman (Sumber: Wicaksono R .Seminar Nasional PU.2014)

### 2.1.1.2. Bentuk-bentuk Permukiman

Sebuah permukiman terbentuk dari komponen-komponen dasar (Mulyana, 2009) yaitu: (1) rumah-rumah dan tanah beserta rumah; (2) tanah kapling rumah dan ruang tanah beserta rumah; dan (3) tapak rumah dan perkarangan rumah.





Gambar 2.3. Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman  
(Sumber: Wicaksono R.Seminar Nasional PU.2014)

### 2.1.2. Permukiman Padat Penduduk

Menurut Khomarudin (1997: 83-112) lingkungan permukiman padat penduduk/kumuh dapat didefinisikan sebagai berikut:

- Lingkungan yg berpenghuni padat (melebihi 500 org per Ha)
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat rendah
- Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standart
- Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan
- Hunian dibangun diatas tanah milik negara atau orang lain dan diluar perundang-undangan yang berlaku.

Gambaran lingkungan kumuh/padat penduduk adalah :

- Lingkungan permukiman yang kondisi tempat tinggal atau tempat huniannya berdesakkan.
- Luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni.
- Rumah hanya sekedar tempat untuk berlindung dari panas dan hujan.
- Hunian bersifat sementara dan dibangun di atas tanah bukan milik penghuni.
- Lingkungan dan tata permukimannya tidak teratur tanpa perencanaan.
- Prasarana kurang (mck, air bersih, saluran buangan, listrik, jalan lingkungan).

- Fasilitas sosial kurang (sekolah, rumah ibadah, balai pengobatan).
- Mata pencaharian yang tidak tetap dan usaha non formal.
- Pendidikan masyarakat rendah.

Penyebab utama tumbuhnya lingkungan kumuh antara lain adalah :

- Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah,
- Sulit mencari pekerjaan,
- Sulitnya mencicil atau menyewa rumah,
- Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan,
- Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta
- Disiplin warga yang rendah.
- Kota sebagai pusat perdagangan yang menarik bagi para pengusaha,
- Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah

## 2.2. Rumah Sehat dan Berwawasan Lingkungan

### 2.2.1. Rumah Sehat

Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang vital, disamping kebutuhan sandang dan pangan. Menurut World Health Organization (WHO), rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik untuk kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan 2001). Sejalan dengan itu, maka rumah sehat didefinisikan sebagai bangunan tempat berlindung dan beristirahat serta sebagai sarana pembinaan keluarga yang menumbuhkan kehidupan sehat secara fisik, mental dan sosial, sehingga seluruh anggota keluarga dapat bekerja secara produktif. Keberadaan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur sangat

diperlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik (Keman: 2005).

Lebih lanjut menurut Sukamto (2004) rumah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi segi kesehatan meliputi:
  - a. Memiliki penerangan dan perangan yang cukup
  - b. Memiliki sarana penyediaan air bersih
  - c. Memiliki sarana pengaturan pembuangan air limbah
  - d. Dinding dan lantai tidak lembab
  - e. Tidak terpengaruh oleh gangguan pencemaran seperti bau, rembesan air kotor, udara kotor
- 2) Memenuhi segi kekuatan bangunan, meliputi:
  - a. Pondasi
  - b. Struktur bangunan
  - c. Bahan bangunan
- 3) Memenuhi segi kenyamanan, meliputi:
  - a. Tersedia ruang yang cukup ukuran ruang sesuai dengan kebutuhan, minimal 9 m<sup>2</sup> per orang dengan ketinggian minimal 2,80 m. Salah satu contoh kebutuhan luas minimum untuk rumah sederhana sehat adalah 27 m<sup>2</sup>
  - b. .Penataan ruang yang serasi
  - c. Dekorasi dan warna yang sesuai
  - d. Penghijauan di pekarangan rumah
- 4) Dapat terjangkau Sehubungan dengan itu, standar kebutuhan ruang untuk rumah sehat adalah 12 m<sup>2</sup> per orang (18 m<sup>2</sup> untuk dua orang, 27 m<sup>2</sup> untuk tiga orang dan seterusnya).

Konsep rumah sehat melibatkan pendekatan sosiologis dan teknis pengelolaan faktor risiko. Konsep tersebut berorientasi pada lokasi, bangunan, kualifikasi, adaptasi, manajemen, penggunaan dan pemeliharaan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu konsep rumah sehat juga mencakup unsur apakah rumah tersebut memiliki

penyediaan air minum dan sarana yang memadai untuk memasak, mencuci, menyimpan makanan, serta pembuangan kotoran manusia maupun limbah lainnya (Komisi WHO mengenai Kesehatan dan Lingkungan, 2001).

### 2.2.2. Rumah Berwawasan Lingkungan

Pergeseran fungsi rumah yang tidak hanya sekedar sebagai tempat berlindung tetapi juga sebagai tempat bersosialisasi antar keluarga, istirahat dengan nuansa kenyamanan, menemukan inspirasi dan berkreasi, dan memperoleh nuansa alami. Kebutuhan memperoleh nilai dan fungsi lebih dari sebuah rumah, membuat perkembangan perumahan menuju ke arah pembangunan nuansa ekologis. Guna mewujudkan pembangunan secara ekologis harus memperhatikan arsitektur dari tiga tingkatan, yaitu:

- 1) perencanaan secara ekologis,
- 2) pembangunan kesehatan manusia dan lingkungan, dan
- 3) bahan bangunan yang sehat (Frick dan Suskiyatno, 1998)

Pembangunan secara ekologis berarti pemanfaatan prinsip-prinsip ekologis pada perencanaan lingkungan buatan.

Pembangunan rumah atau tempat tinggal sebagai kebutuhan kehidupan manusia dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan alamnya dinamakan arsitektur ekologis atau eko-arsitektur. Menurut Frick dan Suskiyatno (1998) perencanaan eko-arsitektur berpedoman pada alam sebagai polanya, sehingga suatu perencanaan harus memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Penyesuaian pada lingkungan alam
2. Menghemat sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan mengirit penggunaan energi.
3. Memelihara sumber lingkungan (udara, tanah, dan air)
4. Memelihara dan memperbaiki peredaran alam.

5. Mengurangi ketergantungan pada sistem pusat energi (listrik, air) dan limbah (air limbah, sampah).
6. Penghuni ikut serta secara aktif pada perencanaan pembangunan dan pemeliharaan perumahan.
7. Tempat kerja dan permukiman dekat.
8. Kemungkinan penghuni menghasilkan sendiri kebutuhannya sehari-hari.
9. Menggunakan teknologi sederhana.

Lingkungan yang berwawasan ekologi adalah gambaran dari permukiman manusia seutuhnya yang mana tidak membahayakan segala aktivitas manusia yang terintegrasi ke dalam dunia alami, yang didukung oleh pengembangan kesehatan manusia dan dapat terus berlanjut sampai masa depan yang tak terbatas (Mc Camant dan Durret 2001).

Lingkungan berwawasan ekologi menggunakan teknologi energi terbarukan, bangunan bernuansa ekologi dan didesain skala manusia untuk mengurangi eksploitasi sumberdaya alam. Permukiman berkelanjutan direncanakan terdiri dari ketersediaan air, kemampuan mengolah limbah, dan kemudahan (akses) tempat bekerja dan pelayanan (Gibellini, 2001).

Lingkungan bernuansa ekologi di perkotaan atau di pedesaan merupakan suatu usaha bersama-sama untuk hidup berkelanjutan yang mana sekarang sebagian besar tersedia untuk kita. Mc Camant dan Durret (2001) mendeskripsikan sebuah permukiman berkelanjutan melalui gambaran pada tiga sektor yaitu: lingkungan, sosial dan ekonomi.

Terdapat lima prinsip utama dari konsep perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan yang harus dikembangkan sesuai dengan kondisi awal yang ada, yaitu:

- 1) mempertahankan dan memperkaya ekosistem yang ada;

- 2) penggunaan energi yang minimal;
- 3) pengendalian limbah dan pencemaran;
- 4) menjaga kelanjutan sistem sosial budaya lokal; dan
- 5) peningkatan pemahaman konsep lingkungan

(Sumber: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup 2004).

Konsep perancangan bangunan hunian yang berwawasan lingkungan lebih kepada komponen-komponen berikut (Budiharjo, 1993);

- 1) Teknologi Hijau; hemat energi dan sumber daya, contohnya; sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap bahan fosil, menggunakan energi lebih efisien dan bijaksana.
- 2) Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, contohnya; pemanfaatan sumber daya alam seperti matahari.

Perbaikan lingkungan pemukiman secara langsung dapat dimengerti sebagai peningkatan kualitas ruang hidup manusia atau perbaikan penggunaan secara kuantitatif, misalnya dengan penghijauan yang dapat menahan radiasi sinar matahari. Perbaikan penggunaan secara kualitatif meningkatkan kenyamanan pengguna (Heinz Frick, 2006).

## Metodologi

Ada 2 (tiga) metode yang dipakai dalam penelitian, yaitu : metode survey dan metode kasus (studi kasus). Metode survei dilakukan dengan pengamatan-pengamatan di lapangan untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang jelas tentang suatu masalah dengan tujuan untuk mengukur fakta, merumuskan dan melukiskan apa yang terjadi dengan pengamatan dan membuat dokumentasi atau foto-foto lingkungan di permukiman wilayah studi.

Sedangkan metode studi kasus dilakukan melalui suatu penelitian berdasarkan topik

yang diteliti dengan mengangkat studi kasus untuk memperjelas permasalahan yang terjadi dengan menggunakan kuisioner atau pendapat para pakar pada instansi terkait. Penelitian dengan pendekatan secara spesifik terhadap masalah dengan lebih mendalam dalam segala tingkatan dengan tujuan mengungkapkan fakta dalam hubungan sebab akibat, untuk mencari keterangan atau informasi mengenai penyebab terjadinya masalah serta bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut.

### Lokasi Studi



Peta Administrasi Kota Jayapura



Peta Citra Lokasi Studi

### 3. Hasil Penelitian

Tingkat kepadatan penduduk di kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop adalah 15,391 dengan jumlah anggota rata-rata dalam keluarga adalah 4,35. Mata pencaharian masyarakat terdiri dari pegawai negeri, nelayan dan swasta, dengan PDRB per kapita 39,3 juta per tahun (Jayapura dalam Angka.2013). Tingkat pendidikan terlihat tamatan SMU mendapat persentase paling besar (47,83%) (sumber: Jayapura dalam Angka) serta angka pencari kerja didominasi oleh tamatan SMU.



Gambar 3.1. Permukiman Penduduk Rawan Bencana

Tabel 3.1

Hasil Analisis Kondisi Permukiman Padat Penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop

No	Kawasan Permukiman	Kondisi Permukiman			Tipe Permukiman		Kepadatan Bangunan		
		Permanen	Semi permanen	Kayu	Linier	Tidak beraturan	0,5 m	1m	Dempet
1	Kelurahan Hamadi	v	v	v	V	V	v	v	V
2	Kelurahan Entrop	v	v	v	-	V	v	-	V



Jalan Lingkungan ,drainase dan Jaringan Air Bersih



Drainase, Jalan Lingkung, Jaringan, Air Bersih

Gambar 3.2. Sarana dan Prasarana pada Lokasi Studi

Tabel 3.3.

Hasil Analisis Kondisi Sarana dan Prasarana pada Permukiman Padat Penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop

No	Sarana Prasarana	Hamadi		Entrop	
		Baik	Belum baik	Baik	Belum baik
1	Jalan	-	V	-	V
2	Air bersih	-	V	-	V
3	Listrik	-	V	-	V
4	Drainase	-	V	-	V
5	Sampah	-	V	-	V
6	Limbah	-	V	-	V
7	Tinja	-	V	-	V

Tabel 3.4

Hasil Analisis Kriteria Permukiman Padat Penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop

No	Kriteria	Hamadi	Entrop
----	----------	--------	--------

Menurut Komarudin (1997)			
1	Lingkungan yang berpenghuni padat (>500 orang/ha)	-	-
2	Kondisi social ekonomi masyarakat rendah	V	V
3	Jumlah rumahnya sangat padat dan ukurannya dibawah standar	V	V
4	Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat teknis dan kesehatan	V	V
5	Hunian dibangun diatas tanah milik Negara atau orang lain	V	V
Menurut Nawaguna dan Viking (2003)			
1	Penampilan fisik bangunannya yang miskin konstruksi, yaitu banyaknya bangunan tak terurus maupun tanpa perawatan	V	
2	Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka.	V	V
3	Kepadatan bangunan yang tinggi, tidak adanya jarak antar bangunan maupun siteplan yang tidak terencana	V	V
4	Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakat yang heterogen	V	V
5	Sistim sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik	V	V
6	Kondisi social yang tidak baik, terlihat dengan banyaknya tindakan kejahatan/criminal	V (perlu penelitian)	V (perlu penelitian)
7	Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa rumah	V	V

Tabel 5.7.

### Program dan Kegiatan Penataan Kawasan Padat Penduduk Berwawasan Lingkungan

No	Tujuan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Pelaku	Jangka Waktu
1	Mengidentifikasi dan menganalisis kondisi Kawasan Permukiman Padat Penduduk	Fak. Lingk	Penduduk	Pembatasan Migrasi penduduk pada wilayah studi, pelatihan keterampilan	Pemerintah, swasta, tokoh masyarakat dan masyarakat	Panjang  Dekat

			Lahan	<p>ilan</p> <p>Sosialisasi rumah sehat kepada masyarakat dan ajakan untuk ikut serta dalam pemeliharaan lingkungan</p> <p>Regulasi dan pemberian sanksi tegas terhadap lahan yang tidak layak dibangun</p>		Panjang
2	Mengidentifikasi dan menganalisis sarana dan prasarana Kawasan Permukiman Padat Penduduk		<p>Jalan</p> <p>Air Minum</p> <p>Drainase</p> <p>Sampah</p> <p>Listrik /Tlp</p> <p>RTH</p>	<p>Perbaikan dan pemeliharaan melibatkan masyarakat</p> <p>Penataan jaringan air bersih</p> <p>Pengerukan sedimentasi pada saluran dan pelebaran selokan dan pembuatan jaringan pembuangan air kotor sehingga air yang masuk laut aman</p> <p>Menambah bak-bak sampah dan armada pengangkutan sampah, pengembangan energy alternatif untuk sampah serta menambah bank sampah</p> <p>Penambahan dan penataan kembali</p>	<p>Pemerintah, swasta, dan masyarakat</p>	<p>Panjang</p> <p>Dekat</p> <p>Dekat</p> <p>Dekat</p> <p>Panjang</p>



				jaringan listrik dan telepon		
				Peraturan untuk memnnam tanaman dalam pot sesuai luasan rumah		

#### 4. Kesimpulan

1. Kondisi kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop, termasuk kawasan permukiman padat penduduk sedang berdasarkan kondisi bangunan, tipe permukiman dan kepadatan bangunan. Perlu adanya program dan kegiatan peremajaan, pemugaran dan permukiman baru sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat untuk daerah-daerah rawan bencana dan dilindungi.
2. Sarana dan prasarana meliputi; jalan lingkungan, jaringan air bersih, drainase, limbah, persampahan pada kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Hamadi dan Kelurahan Entrop sudah ada tetapi perlu penataan, penambahan dan pemeliharaan lebih lanjut, lewat kerjasama yang terpadu antara pemerintah, swasta, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat dengan masyarakat.

#### Saran

1. Bagi pemerintah daerah; dalam pengadaan permukiman terutama permukiman padat penduduk harus melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pembuatan program-program dan disosialisasikan dengan memperhatikan segi lingkungan, ekonomi dan sosial sehingga tercipta permukiman yang nyaman, aman, ramah lingkungan dan terjaga kelestarian budaya lokal.

2. Bagi pengembang/swasta; dalam penataan ruang khususnya untuk penataan lahan permukiman padat penduduk hendaknya memperhatikan rumusan kriteria permukiman sehat dan berwawasan lingkungan agar keberadaan permukiman serasi dengan alam.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abadi A.2006. *Problematika Penentuan Sampel Dalam Penelitian Bidang Perumahan Dan Pemukiman*.Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur.Institut Teknologi Bandung
- .Anonim. 1997. *Rumah dan Lingkungan Pemukiman Sehat* . Jakarta : Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum R.I.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.2006.*Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Distrik Jayapura Selatan*.BAPPEDA Kota Jayapura
- Budiharjo Eko.2009.*Perumahan dan Pemukiman Di Indonesia*.PT Alumni, Bandung.
- Budiharjo Eko, dkk. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*.PT Alumni, Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Data Kependudukan dan Luas Wilayah Kota Jayapura Tahun 2010*. BPS Prov Papua
- Badan Pusat Statistik. 2013.*Jayapura Dalam Angka*. BPS Prov Papua
- Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2000. *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Permukiman*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Permukiman.
- Ditjen Ciptakarya. 1997. *Pedoman Rumah Sederhana Sehat*. Jakarta:
- Dwira A. 2005. *Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Tinjauan*.Jurnal Sistem Teknik.Universitas Sumatera Utara
- Departemen Pekerjaan Umum.*Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan Dan Sarana Lingkungan Perumahan dan Kota Kecil*.DPU
- Frick,Tri Hesti M. 2006. *Arsitektur Ekologis(konsep arsitektur ekologis di iklim tropis, penghijauan kota dan kota ekologis, serta energy terbarukan)*.Kanisius-Universitas Soegijapranata

- Frick, H. dan Suskiyatno. 1998. *Dasar-dasar Eko-Arsitektur, Konsep arsitektur berwawasan lingkungan serta kualitas konstruksi dan bahan bangunan untuk rumah sehat dan dampaknya atas kesehatan manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah. 2002. *tentang Kebutuhan Luas Minimum Bangunan dan lahan untuk rumah Sederhana Sehat*.
- Kirmanto, J. 2002. *Pembangunan Perumahan dan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan. Makalah disampaikan pada Seminar Peduli Banjir "Forest"*; Jakarta Tanggal 25 Maret 2002.
- Komarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*. Yayasan Real Estate Indonesia. Jakarta: PT. Rakasindo.
- Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan . 2001. Di dalam : Kusananto H, Editor. *Planet Kita Kesehatan Kita*.. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, p. 279.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. 2011. *Skema Sistem Sarana dan Prasarana*. Kementrian PU
- Peraturan Daerah Papua No 5 tahun 2008. *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura*.
- Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Jayapura (RTBL). 2007-2027
- Siagian I. 2005. *Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan (Salah Satu Aspek Penting Dalam Konsep Sustainabel Development)*. Jurnal Program Studi Arsitektur. Universitas Sumatera Utara
- Sukamto. 2004. *Rumah dan Lingkungan Sehat : Pegangan untuk kader dan pendamping masyarakat*. Yogyakarta: Yayasan Griya Mandiri.
- Undang-undang RI No 32 Tahun 2009. *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang RI No 26 Tahun 2007. *Tentang Peraturan Penataan Ruang*.
- Undang-undang RI No 4 Tahun 1992. *Tentang Perumahan dan Pemukiman*.
- Undang-undang RI No 1 Tahun 2011. *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Weking B. 1993. *Perancangan Arsitektur Rumah Tinggal Sehat*. Ars Group. Bandung
- Wakely, Patrick J. et all. 1976, *Urban Housing Strategies, Education and Realization*, New York: Pitnan Publisher.
- Widjanarko A. 2006. *Pembangunan Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah dan Kota*. Jurnal Info URDI (Urban and Regional Development Institute) Volume 21, Mei-November 2006.